

**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi pada Kabupaten Sampang dengan Belanja Daerah sebagai Variabel *Intervening***

**Siti Rohizah<sup>1</sup>, Kiky Asmara<sup>\*2</sup>, Fauzatul Laily Nisa<sup>3</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21011010070@stunden.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, kikiasmara.ep@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>,

f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Economic development in a region is one of the starting points in the implementation of development with the hope that the region can find out the potential that exists in order to utilize it to fulfill the needs in the region. Sampang Regency still has problems and challenges in regional financial management. Balance funds are still the main source of regional income with an increasing value. This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue and Balancing Funds on Economic Growth with Regional Expenditure as an intermediary variable that is considered to be able to connect between variables. With the quantitative analysis method and path analysis technique, the results show that Local Revenue has a negative and insignificant effect on Economic Growth, while the Balance Fund variable has a positive and significant effect on Economic Growth. Furthermore, the Regional Expenditure variable cannot mediate the relationship between Local Revenue and Economic Growth because it still produces a negative value, on the other hand, Regional Expenditure is able to become an effective intervening variable in the relationship between balancing funds and economic growth.*

**Keywords:** *Economic Growth, State Budget, Fiscal Balance Fund*

**ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah menjadi salah satu titik awal dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan daerah tersebut dapat mengetahui potensi yang ada guna memanfaatkannya sebagai pemenuhan kebutuhan di daerahnya. Kabupaten Sampang masih memiliki masalah dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana perimbangan masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan nilai yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel perantara yang dianggap dapat menghubungkan antar variabel. Dengan metode analisis kuantitatif dan Teknik analisis jalur, maka didapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya, variabel Belanja Daerah tidak bisa memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi karena tetap menghasilkan nilai negatif, disisi lain, Belanja Daerah mampu menjadi variabel *intervening* yang efektif pada hubungan antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, APBN, Dana Perimbangan

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah di kabupaten/kota menjadi salah satu titik awal dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan daerah tersebut dapat mengetahui potensi yang ada guna memanfaatkannya sebagai pemenuhan kebutuhan di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah yang bersifat jangka panjang dalam suatu pembangunan terutama pada daerah. Menurut Boediono dalam (Asmara, 2024) pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara adalah tolak ukur dalam menaikkan kesejahteraan penduduknya. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur suatu daerah atas kemampuannya dalam melakukan produksi barang dan jasa. Faktor produksi adalah salah satu faktor krusial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, naik atau turunnya produksi memiliki dampak yang besar pada Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

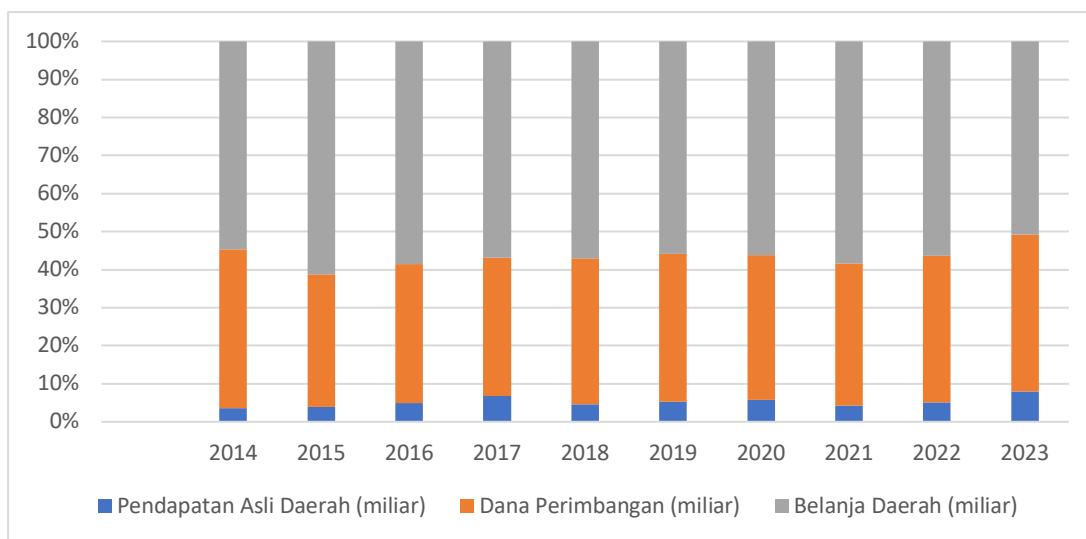
Dalam mengatasi setiap masalah pada pertumbuhan ekonomi daerah, diberlakukan kebijakan otonomi daerah. Menurut UU No 22 tahun 1999 perihal asas desentralisasi, otonomi daerah adalah hak dan kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelola atau mengatur kepentingan rakyatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. pemberlakuan otonomi daerah dimaksudkan agar suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam artian menjadi daerah yang mandiri dengan terus berupaya mendorong dan menggali sektor unggulan yang dapat menunjang pendapatan dan daya saing sehingga kekuatan fiskal semakin meningkat.

Tingkat kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya terwujud dalam pelaksanaan tugas pada otonomi daerah yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perannya sebagai pemenuhan pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi desentralisasi fiskal yang tepat mengenai pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat tiga komponen yang menjadi indikator dalam APBD yakni pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.

Pengeluaran sebagai instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk mendorong kegiatan dan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi peran pemerintah dalam instrumen pengeluaran ditunjukkan dengan peningkatan pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur suatu daerah dalam tingkat kemandiriannya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga berasal dari sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Selain bergantung pada Pendapatan Asli Daerah, suatu daerah tetap memerlukan bantuan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat yakni dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan implementasi desentralisasi fiskal yang berdampak langsung dengan kemandirian daerah. Dana Perimbangan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 dibagi menjadi tiga sumber yakni Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan keuangan daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk memberikan dana pada proyek tertentu sesuai dengan kebutuhan daerahnya.



**Gambar 1. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sampang**

Kabupaten Sampang masih memiliki masalah dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Berdasarkan analisis grafik tren Dana perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan nilai yang terus meningkat. Besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah yang mencapai lebih dari 80% setiap tahun. Hal ini justru berkebalikan dengan Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan nilai yang jauh lebih kecil. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat dapat menjadi isu yang perlu diatasi dalam mencapai kemandirian fiskal.

Tingkat ketergantungan daerah melalui transfer pemerintah pusat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerahnya maka semakin sedikit pula jumlah transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat (Rinaldi, 2016). Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Sampang masih tergolong rendah bahkan jika dibandingkan dengan empat kabupaten lain di wilayah Madura.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Monica & Sa'roni 2022) dengan objek Provinsi Kalimantan Selatan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK memberikan pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. PAD dan

Belanja Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, DBH, DAU, dan DAK tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Daerah dapat menjadi penghubung antara PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang akan diteliti meski dengan objek yang berbeda yakni Kabupaten Sampang yang dinilai memiliki karakteristik yang hampir sama dengan objek penelitian sebelumnya dari segi Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu mencukupi pengeluaran daerah sehingga masih memiliki ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Studi yang dilakukan pada Kabupaten Sampang dapat memberikan Gambaran yang lebih spesifik yang belum diungkap dalam penelitian sebelumnya, terutama bagaimana karakteristik PAD dan Belanja Daerah pada wilayah yang lebih kecil dengan potensi ekonomi lokal yang berbeda

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan pada PAD dan Dana Perimbangan dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam memenuhi belanja daerahnya. Alokasi belanja daerah yang tepat pada struktur produktivitas daerah berpotensi meningkatkan fasilitas publik dan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, penggunaan belanja daerah yang efektif dapat menjadi jembatan antara PAD dan Dana Perimbangan sebagai penentu pengaruh pertumbuhan ekonomi.

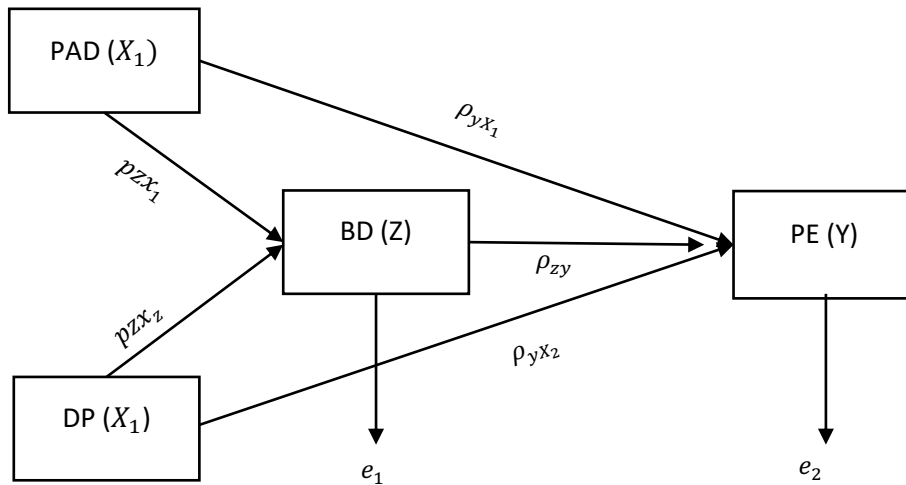
## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sampang menggunakan Teknik Total Sampling yakni pengambilan sampel data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang, Laporan Keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Sampang, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan, dan publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum uji analisis utama, uji ini dilakukan guna memastikan data telah memenuhi syarat untuk melanjutkan penelitian yang terdiri atas asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya alat analisis yang digunakan yakni

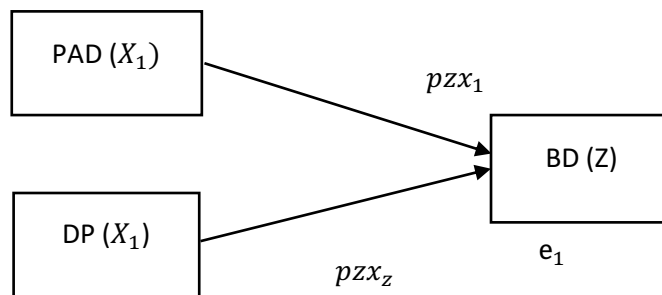
**Analisis Jalur**



**Gambar 2. Model Diagram Jalur**

Analisis Jalur (*Path Analysis*) untuk menganalisis hubungan antar variabel sebagai sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda apabila variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara langsung maupun tidak langsung yakni dengan melalui variabel perantara.

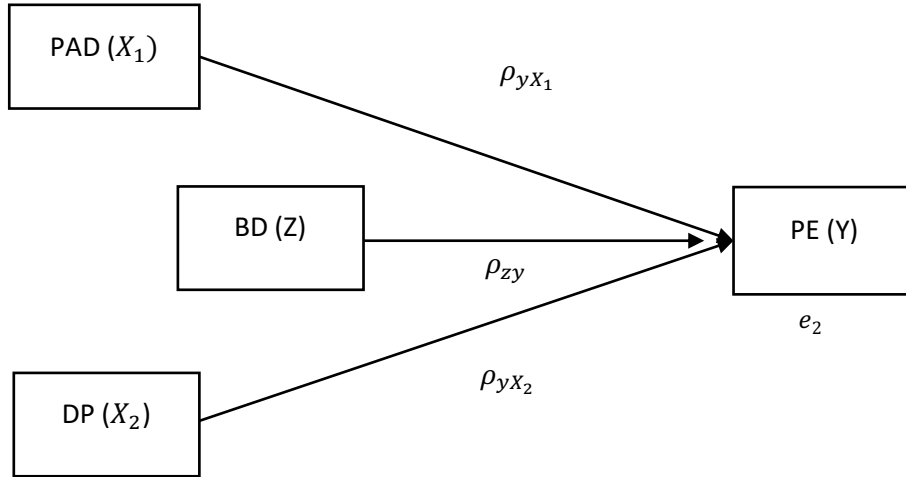
**Model Sub Struktural 1 (Pengaruh Langsung)**



**Gambar 3. Model Sub Struktural 1**

$$Z = p_{zx_1}X_1 + p_{zx_2}X_2 + e_1$$

**Model Sub Struktural 2 (Pengaruh Tidak Langsung)**



**Gambar 4. Model Sub Struktural 2**

$$Y = pyX_1 + pyX_2 + pyZ + e_1$$

**Keterangan**

- Y : Pertumbuhan Ekonomi
- X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (X1)
- X<sub>2</sub> : Dana Perimbangan (X2)
- Z : Belanja Daerah (Z)
- $\rho_{ZX_1}$  : Koefisien Jalur PAD (X1) terhadap BD (Z)
- $\rho_{ZX_2}$  : Koefisien Jalur DP (X2) terhadap BD (Z)
- $\rho_{yX_1}$  : Koefisien Jalur PAD (X1) terhadap PE (Y)
- $\rho_{yX_2}$  : Koefisien Jalur DP (X2) terhadap PE (Y)
- $\rho_{zy}$  : Koefisien Jalur BD (Z) terhadap PE (Y)
- $\alpha$  : Konstanta – besarnya nilai variabel Y apabila nilai variabel X=0
- e : Error – tingkat kesalahan pendua (variabel pengganggu)

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel independen dan dependen sehingga dapat membantu dalam menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan dengan uji koefisiensi determinasi dan uji t (parsial).

**Uji Sobel**

Uji sobel sebagai bagian dari identifikasi pengaruh tidak langsung variabel dependen oleh variabel independen melalui perantara variabel *intervening*.

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

Dan

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Keterangan:

$S_{ab}$  : besar *standard error* pengaruh tidak langsung

$S_a$  : *Standard error* koefisien a

$S_b$  : *Standard error* koefisien b

a : jalur X dengan Z

b : jalur Z dengan Y

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Shapiro-Wilk	Ket.	Keterangan
	Sig.		
PAD	0.065	> 0,05	Terdistribusi Normal
Dana Perimbangan	0.119	> 0,05	Terdistribusi Normal
Belanja Daerah	0.433	> 0,05	Terdistribusi Normal
Pertumbuhan Ekonomi	0.178	> 0,05	Terdistribusi Normal

Berdasarkan tabel hasil analisis uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, didapatkan bahwa seluruh variabel memiliki signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

**Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas**

Regresi	Coefficience				Keterangan
	Tolerance	Ket.	VIF	Ket.	
PAD - BM	0,253	> 0,10	3,949	< 10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DP - BM	0,253	> 0,10	3,949	< 10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

PAD - PE	0,245	> 0,10	4,076	< 10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DP - PE	0,189	> 0,10	5,299	< 10	Tidak Terjadi Multikolinearitas
BM - PE	0,568	> 0,10	1,762	< 10	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan hasil olah data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memenuhi syarat berada pada  $VIF < 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,10$  sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Sub Struktural 1**

Variabel	Unstandardized Residual	Ket	Keterangan
PAD	0,190	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	0,307	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas, variabel PAD dan variabel Dana Perimbangan memenuhi syarat  $Sig. > 0,05$ . Sehingga dalam model regresi persamaan struktural 1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Sub Struktural 2**

Variabel	Unstandardized Residual	Ket	Keterangan
PAD	0,366	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana Perimbangan	0,507	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja Daerah	0,804	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis di atas, didapatkan hasil uji pada variabel PAD, variabel Dana Perimbangan, dan variabel Belanja Daerah memenuhi syarat  $Sig. > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

### Uji Autokorelasi

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model Stummary					
Model	DW	dL	4-dL	dU	4-dU
Model Sub Struktural 1	1,517	0.6972	3,3028	1.6413	2,3587
Model Sub Struktural 2	1,887	0.5253	3,4747	2.0163	1,9837

Berdasarkan hasil olah data di atas, untuk model sub structural 1 dengan jumlah sampel sebanyak 10 (n=10) dan jumlah variabel independen 2 (K=2) menghasilkan analisis  $1,6413 < 1,517 < 2,3587$  ( $dU < DW < 4-dU$ ) maka dari hasil analisis tersebut, hipotesis diterima atau tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan model sub structural 2 dengan jumlah sampel sebanyak 10 (n=10) dan jumlah variabel independen 3 (K=3) menghasilkan analisis  $2,0163 < 1,887 < 1,9837$  ( $dU < DW < 4-dU$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**Analisis Sub Struktural 1 (Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah)**

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Model Sub Struktural 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(constant)	534337974,0	534337974,0		0,846	0,425
PAD	-1,179	-1,179	-0,268	-0,474	0,650
Dana Perimbangan	1,249	0,807	0,875	1,547	0,166
Dependent Variable : Belanja Daerah					

$$Z = - 0,268X_1 + 0,875X_2 + e_1$$

Variabel PAD menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja ekonomi yakni sig.  $0,650 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,474 < t_{tabel}$  2,306. Dari hasil temuan ini mengindikasikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Variabel dana perimbangan menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,547 dan signifikan 0,166. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

**Uji Koefisien Determinasi**

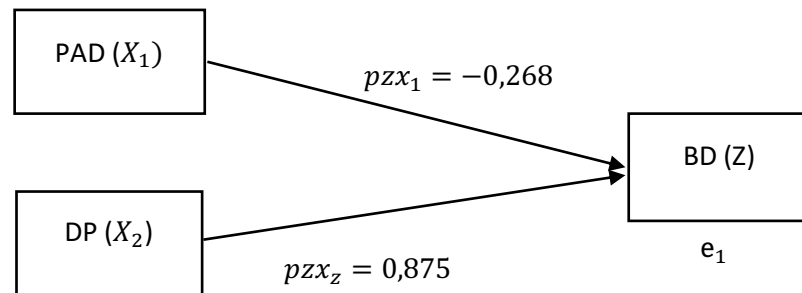
**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Sub Struktural 1**

Model	R-Square
Model Substruktural 1	0,432

Model sub struktural 1 sebesar 0,432. Maka variabel PAD dan Dana Perimbangan mempengaruhi Belanja Daerah di Kabupaten Sampang sebesar 43,2% saja, sedangkan 56,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti sebagaimana dapat ditunjukkan oleh *Error* (e) yaitu:

$$e_1 = 1 - R^2$$

$$e_1 = 1 - 0,432 = 0,568$$



Gambar 5. Hasil Model Sub Struktural 1

**Analisis Sub Struktural 2 (Pengaruh PAD, dan Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah)**

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Model Sub Struktural 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
(constant)	6060.823	6060.823			
PAD	-6,892	-6,892	-0,431	4,674	0,003
Dana Perimbangan	4,854	4,854	0,934	-1,396	0,212
Belanja Daerah	1,511	0,000	0,415	2,654	0,038
Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi					

$$Y = -0,431X_1 + 0,934X_2 + 0,415Z + e_1$$

Variabel PAD menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni sig. 0,212 > 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,396 <  $t_{tabel}$  2,365. Dari hasil temuan ini mengindikasikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga PAD tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang.

Variabel dana perimbangan menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,654 >  $t_{tabel}$  2,365 dan signifikan 0,038 < 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang.

Variabel belanja daerah menghasilkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,044 >  $t_{tabel}$  2,365 dan nilai sig. 0,087 > 0,05. Nilai signifikan dapat dikatakan mendekati signifikansi secara statistic pada level kepercayaan 90% dengan arah hubungan positif sehingga variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang

**Uji Koefisien Determinasi**

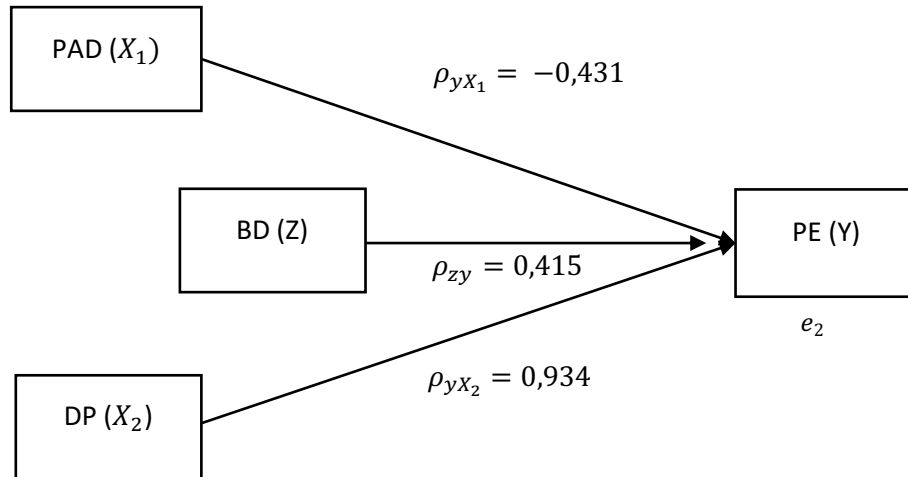
**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Sub Struktural 2**

Model Summary		
Model	R	R-Square
Model Sub Struktural 2	0,860	0,789

Nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada model substructural 2 sebesar 0,789 yang artinya variabel PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang sebesar 78,9%, sedangkan 21,1% pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang dipengaruhi oleh variabel lain

$$e_2 = 1 - R^2$$

$$e_2 = 1 - 0,789 = 0,211$$

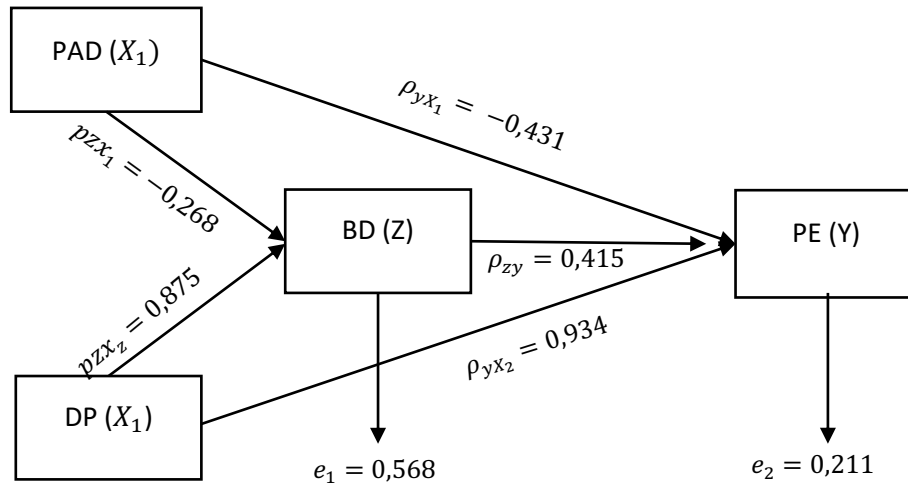


**Gambar 6. Hasil Model Sub Struktural 2**

**Hasil Analisis Jalur**

**Tabel 9. Hasil Analisis Jalur**

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung Melalui Belanja Daerah	Total Pengaruh
PAD – PE ( $pyX_1$ )	-0,431	-0,111	-0,542
DP – PE ( $pyX_2$ )	0,934	0,351	1,285
BD – PE ( $pyZ$ )	0,415	-	-



Gambar 7. Hasil Model Jalur

**Uji Sobel**

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah**

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(1,511 \times 2,485)^2 + (-1,179 \times 0,000)^2 + (2,485 \times 0,000)^2}$$

$$= \sqrt{14,087858772}$$

$$= 3,753$$

$$Z_{hitung} = \frac{-8,673}{3,753}$$

$$= -2,311$$

$$Z_{tabel} = Z_{1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

$$= Z_{1-\left(\frac{0,05}{2}\right)}$$

$$= Z_{0,975} = 1,96$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dihasilkan  $Z_{hitung} - 2,311 < Z_{tabel} 1,96$  sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah**

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

$$S_{ab} = \sqrt{(1,511 \times 0,807)^2 + (4,854 \times 0,000)^2 + (0,807 \times 0,000)^2}$$

$$= \sqrt{1,48688026813}$$

$$= 1,219$$

$$\begin{aligned}Z_{hitung} &= \frac{6,741}{1,219} \\ &= 5,599 \\ Z_{tabel} &= Z_{1-\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \\ &= Z_{1-\left(\frac{0,05}{2}\right)} \\ &= Z_{0,975} = 1,96\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, dihasilkan Zhitung 5,599 > 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah

### **Pengujian Hipotesis**

#### **H1: Diduga terdapat pengaruh langsung Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel PAD menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni sig. 0,212 > 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,396 <  $t_{tabel}$  2,365. Dari hasil temuan ini mengindikasikan bahwa H1 ditolak, sehingga PAD tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang.

Tidak adanya pengaruh berdasarkan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan peran PAD tidak cukup signifikan untuk mendanai pengeluaran Pembangunan Kabupaten Sampang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

#### **H2: Diduga terdapat pengaruh langsung Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel dana perimbangan menghasilkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,654 >  $t_{tabel}$  2,365 dan signifikan 0,038 < 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa H2 diterima, sehingga variabel dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang.

Komponen dalam dana perimbangan diatur oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan dan prioritas nasional maupun daerah sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Sampang cenderung mengalokasikan pengeluarannya terhadap kegiatan pembangunan produktif seperti distribusi Kesehatan, program Pembangunan infrastruktur, dan Pendidikan sebagai sektor fasilitas dan layanan publik penggerak pertumbuhan ekonomi

### **H3: Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil uji Sobel  $Z_{hitung} -2,311 < Z_{tabel} 1,96$  dengan koefisien *intervening*  $-0,111$  maka PAD tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah, sehingga mengindikasikan bahwa H3 ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah di Kabupaten Sampang.

Kondisi ini dapat disebabkan meski terdapat peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah nyatanya belum mampu secara penuh dalam mendanai belanja daerah yang sifatnya produktif menunjang pertumbuhan ekonomi. Alokasi pendapatan yang berasal dari PAD lebih banyak dialokasikan untuk sektor belanja rutin terutama belanja pegawai dan operasional birokrasi lainnya, bukan pada sektor penggerak ekonomi sehingga pengeluaran tersebut tidak secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat dan cenderung tidak proporsional

### **H4: Diduga terdapat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil analisis uji Sobel  $Z_{hitung} 5,599 > Z_{tabel} 1,96$  dengan koefisien *intervening* sebesar  $0,351$  sehingga mengindikasikan bahwa H4 diterima yang artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah di Kabupaten Sampang.

Dana Perimbangan bersifat sebagai bantuan keuangan yang memang ditujukan untuk membantu suatu daerah dalam melaksanakan otonomi dan mengurangi kesenjangan pada keuangan bahkan Pembangunan, selain itu salah satu yang termasuk ke dalam dana perimbangan yakni seperti Dana Alokasi Khusus telah diatur oleh pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas nasional sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah cenderung mengalokasikan pengeluarannya terhadap kegiatan pembangunan produktif seperti distribusi Kesehatan, program Pembangunan infrastruktur, dan Pendidikan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang. Dana Perimbangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sampang. Belanja Daerah tidak mampu menjadi variabel *intervening* yang efektif dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Belanja daerah mampu menjadi variabel *intervening* yang efektif pada hubungan antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Sampang perlu mengupayakan peningkatan kualitas dan kapasitas Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi ekonomi lokal yang belum optimal seperti pada sektor pariwisata, UMKM, dan pertanian berbasis Masyarakat. Selain itu, perlu adanya inovasi kebijakan pajak dan retribusi yang tidak membebani Masyarakat tetapi dapat memperluas penerimaan daerah. Belanja daerah harus diarahkan untuk membiayai kegiatan yang memiliki efek dapat mendukung nilai *output* pada perekonomian seperti infrastruktur, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, R. and Sari, L.K. (2021) 'Pengaruh desentralisasi fiskal dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019', in *Seminar Nasional Official Statistics*, pp. 641–650.
- Asmara, K. (2024) 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sampang', *Journal of Economics Development Issues*, 7(1), pp. 16–22.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Februari 29). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang tahun 2023. *Badan Pusat Statistik*. <https://sampangkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/29/21/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-sampang-tahun-2023.html>
- Baron, R., & Kenny, D. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51, 1173-1182.
- Christia, A.M. and Ispriyarso, B. (2019) 'Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia', *Law Reform*, 15(1), pp. 149–163.
- Fatimah, N.N., Nopiyanti, A. and Mintoyuwono, D. (2019) 'Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah', *Jurnal EQUITY*, 22(2), pp. 197–214.
- Haga, Ronni, Nugroho, Sanjayanto, Bancin, John Budiman & Christmas, Andreas F. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*. 1(4), 127–141. <<https://ejournal.area1.or.id/index.php/JIEAP/article/view/633>>. DOI: 10.61132/jieap.v1i4.633.
- Ismail, Taufiq. (2022). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang", Skripsi, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

- Monica, F. and Sa'roni, C. (2022) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019)', *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), pp. 819–833.
- Rinaldi Rinaldi *et al.* (2024) 'Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023', *Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(3), pp. 32–41. Available at: <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.627>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taher, S. and Tuasela, A. (2019) 'Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika', *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(2), pp. 40–58.
- Yuliana, Alifia. (2023). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur", Skripsi, Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.